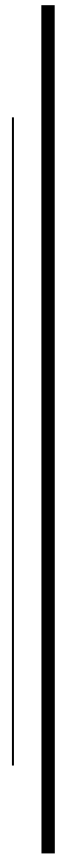




KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN PORTAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN PNS
SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2019



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2019

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN PORTAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN PNS
SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai suatu sistem pengolah data guna menghasilkan sebuah informasi yang kredibel di era globalisasi ini semakin mutlak diperlukan oleh seluruh kelembagaan pemerintah di Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Jawa Tengah. SIM pengelola data kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dan pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan sebuah sistem pengelolaan kepegawaian yang diberi nama

SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian) sebagai suatu sistem pengelola data kepegawaian PNS seluruh Indonesia dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut. Data adalah salah satu komponen penting dalam suatu sistem, agenda Pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dibidang kepegawaian adalah penyusunan database yang tersentralisasi sehingga konsistensi dan keseragaman data dapat terjaga. Proses penyusunan tersebut diawali dengan menyesuaikan format NIP Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan format yang lebih fleksibel, sehingga dapat dipergunakan oleh seluruh PNS yang tersebar di berbagai departemen di Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah dengan menyamakan isi database kepegawaian BKN dengan database Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, proses penyamaan data ini lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi data.

Rekonsiliasi data antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BKN sudah dimulai sejak tahun 2010, diawali dengan permohonan struktur data SAPK lama oleh Pemerintah Provinsi dan kemudian diadakan proses penyamaan struktur data dan tabel referensi Simpeg Pemerintah Provinsi dengan struktur data dan tabel referensi aplikasi data kepegawaian BKN. Seiring dengan berjalannya kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terbentuklah database kepegawaian yang memiliki akurasi data lebih tinggi serta solid dan dapat dimanfaatkan dalam layanan mutasi kepegawaian.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Sistem Aplikasi Portal Kepegawaian PNS, yaitu suatu sistem yang berfungsi sebagai portal pengolah data dari beragam Simpeg yang ada di Jawa Tengah dan menampilkannya sebagai sebuah informasi yang terintegrasi.

Aplikasi Portal Kepegawaian se-Jawa Tengah mempunyai misi mensinkronkan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Aplikasi Data Kepegawaian BKN serta penyajian informasi kepegawaian se-Jawa Tengah kepada *stakeholder*. Guna mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan pendataan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui metode inventarisasi serta pengiriman data PNS Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna sinkronisasi data dengan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

Guna Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah, perlu dikembangkan sebuah mekanisme penggunaan baik data Simpeg Kabupaten/Kota dengan keberagaman struktur yang ada atau penggunaan data akhir dari aplikasi data kepegawaian BKN sebagai sumber informasi data pada Aplikasi Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

- a. Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah mekanisme pengolahan data pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui pengembangan modul Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah.
- b. Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan data BKN sebagai sumber data kepegawaian yang dipergunakan dalam seluruh proses mutasi kepegawaian dengan mengadakan evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, dll serta mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan data BKN.

2. Tujuan:

- a. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pejabat pengelola kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta BKN dalam pemanfaatan aplikasi data kepegawaian BKN, serta memecahkan masalah yang timbul;
- b. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada aplikasi data kepegawaian BKN, sehingga diperoleh data kepegawaian yang akurat dan *up to date*;
- c. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS se-Jawa Tengah yang bersumber baik dari Simpeg atau data akhir BKN untuk diolah menjadi informasi pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.
- d. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan *up-to-date*;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya maksud dan tujuan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2019 akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, ataupun penyelenggaraan rapat koordinasi yang melibatkan pengelola kepegawaian Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta BKN.
- b. Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten / Kota.

D. SASARAN/PESERTA

Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat langsung dari aplikasi data kepegawaian BKN baik dalam seluruh kegiatan mutasi kepegawaian maupun pengelolaan data PNS P3D, serta para pengelola kepegawaian dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

E. NARASUMBER

- a. Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat
- b. Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah

F. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2019 berlokasi di Jawa Tengah.

G. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2019											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK				■								
2	Rapat Koordinasi				■	■							
3	Konsultasi/Koordinasi				■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Rakor Pengelolaan data kepegawaian kab/kota				■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Pengembangan Aplikasi							■	■	■	■	■	

H. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan tujuan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2019 adalah;

1. Diperolehnya data kepegawaian yang akurat dan *up to date* serta terciptanya saling dukung antar pengelola kepegawaian dengan :
 - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi (rapat penghubung) dengan mengundang para pengelola data kepegawaian Kabupaten/Kota serta BKN;
 - b. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan aplikasi data kepegawaian BKN pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 - c. Pemecahan dan solusi terhadap masalah kepegawaian pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah terciptanya sebuah mekanisme pengelolaan data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan dukungan pelaksanaan Pengembangan Modul Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi kebutuhan;
 - b. Penyusunan hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
 - c. Dukungan interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
 - d. Penerapan dan pemberlakuan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
 - e. Penentuan tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - f. Penyediaan fasilitas terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;
Penyusunan tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi.
 - g. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota.

I. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2019 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

J. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2019.

Semarang, Maret 2019

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG. SH, MM

Pembina

NIP. 197001131989032002